



WALIKOTA RAMA RBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR ,47 TAHUN 2009

TENTANG

REALISASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KOTA BANJARBARU HASIL PEMILIHAN UMUM
PERIODE 2004-2009 TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang
- a. balm* bcrdasarkan pertimbangan sebagransann dimaksud pada huruf a di alas perdu menetapkan dengan Pcnuuran Walikota tentang Realisasi n^a,111101 KOUAlgall Kepala Portal Poliuk Di Kota Itanjarbaru Mud Parnildum Umum Periodc 2004-2009 Tabun Anggaran 2009:
- Mengingat
1. Undang-Undang Nano/ 0 Tabun 1999 tanning rembenrukon Kotainadsa Oncrall Tingkal Il lianjarbaru 11-cmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Noma 43, fambahan Lemharan Negara Republik Indonesia NOMOT 31t22);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tabun 20(4 tanking Panicrintahan Daerah !Lamb:iron Negara Republik Indonesia Tahun 20(4 Nomor 125. Tainhahan Lembasan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) whapinuma relish diubah bebcrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 I ahtui 2008 tenting Panthahan Kedua Alas Lindang-Unding Nomor 32 Tahun 20(4 tenting Pemerintahan Ward! I Lanihanin Ncgara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambora, Lettibiran N agora Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. I Indang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 rantang Parimbengan Keuangan Amara Panic:Mud) Pusat dun Pontrintahan Diwinh (Lernharan Negara Rapublik Indonesia Tabun 2004 Nomor 126, Tamhuhan Lembanm Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 22 "abut! 2007 tanning Penyclengpraan Pemilihan Umum (Innbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Manor 59. turrittahan Lcmharan Negara Republik Indonesia Nomor 4721):
 - S. iindang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tanning Parts) Pollak tlernhoran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambaban Lemluran Negam Republik Indonesia Nomor 4801);

5. Badan Kesatuan Bangsa* dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Samarinda.
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Samarinda
7. Partai Politik adalah organisasi politik yang beranggotakan sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela untuk melaksanakan dan melaksanakan tugas dan kewajiban untuk melaksanakan pemerintahan yang baik dan Negara melalui Pemilihan Umum.
8. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Partai Politik yang telah mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
9. Dewan Pimpinan [Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah partai politik di Tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Murni dan tidak terikat oleh ketentuan lain sehubungan dengan itu, dan lain-lain.
10. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Murni dan tidak terikat oleh ketentuan lain yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
11. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di Kota Samarinda yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Murni dan tidak terikat oleh ketentuan lain yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
12. Komisi Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda.
13. Ketua Komisi Pemilihan Umum adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.

B.AB 11
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membiayai kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau pelaksanaan DPC Partai Politik di Kota Samarinda dan seterusnya. Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang bersangkutan
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang telah mendapatkan kursi di DPRD.

BAD III
BESARNYA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil pemilihan umum Tahun 2004
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda
- Untuk himmah perolehan kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini

Pasal 4

11. Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kota Samarinda adalah sebagai berikut.

1.1 An a NILAI RANILIAN a Y Kp 1(04
PER MASI

12

Ket : E Ba Jumlah Milik dihitung tanktgal pplanukan.
Kp 2004 jumlah perolehan kursi miring-rnasing parpol yang mcndaNtkan kursi
di DPRD hasil penult' 2004.

(2) Rincian besarnya jumlah bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II **PCIIItitUI Walikota**

Pasal 5

Anggaran bantuan keuangan kepada Paripol di Kota Banjarnegara distunpaikan oleh Walikota kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.

MB IV PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal

11.1 Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPC Paripol ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Walikota dengan menggunakan kop surat dan cap stempel panai politik dengan melampirkan

- a. Surat (Ks-portrait) DPP **Patti** Politik yang menetapkan gunman keprngutusan DPC Paripol Politik yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya yang hercuigkutam Photocopy Sums Keterangan NPWP yang dilgalisir pejabat berenang. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi politik di DPRD yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum;
- d. Surat pernyataan panai politik yang menyatakan bersedia thiamin sesuai gcratumui penrubnzzan apabila mcemberikan keterangan yang tidak bea yang ditzusdaumgani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di utak materai dengan menggunakan kop surat dan stcmpeI partai

O) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat 11.1 tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Jan **Keit= Komisi** Pemilihan t 'mum

BAB V PENELMAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal

11.1 Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada paripol di **KOLi** Runtarbosu alom dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Walikota.

(2) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Bentuk Berita Acara Penelitian dan pemeriksaan kepengurusan dimaksud dalam Pasal 7 terlampiran, dalam lampiran III Penetapan Walikota ini.

BAB VI PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal

Penyerahan bantuan keuangan kepada panai politik di Kota Banjarnegara dilaksanakan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat alas nuns Walikota kepada Ketua dan Bendahara DPC Paripol di Kota Banjarnegara atau sebutan lainnya

Pembaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam penyerahan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank sesuai dengan DPC Panitia Politik yang bersangkutan
- b. Sumbu Tanda Terima uang Isamu yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani di atas materai oleh (Kau) dan Bendahara dengan mencantumkan kop surat dan stempel DPC Panitia Politik atau sebutan lainnya yang bersangkutan,
- c. Matrik Acara Scrub Terma dibuat dalam rangkai A (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Baskut Kcsaman Bangsa dan Petindungan Masyarakat sebagai Pihak Panitia Kowa dan Bendahara: Mani DPC Panitia Politik atau sebutan lainnya yang bersangkutan terhadap Pihak Kedutaan

Pasal 11

Bentuk Barite Acara Saab Talmo bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam lampiran IV Peraturan Walikota ini.

BAB VII LAPORAN PINGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KECIL

Pasal 12

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada panitia politik di Kota Banjarbaru disampaikan oleh Pimpinan Panitia Politik kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran
- (2) Laporan penggunaan bantuan keuangan dimaksud pada ayat (1) akan di audit oleh Badan Pemantauan Keuangan.
- (3) Laporan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Kepala Komisi Perlindungan Umum.

Pasal 13

Bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam lampiran V Peraturan Walikota ini.

BAB VIE
KETENTUAN PENUTUP

Prost | 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkair

Agar setiap orang mengetahuinya: mencrintabkan pengundangan (column Walikota ini dengan racmpalannya dalam Botha Dacrah Kota Ranjarharu.

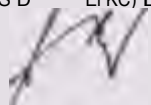
Ditmackan di Banjarbaru
polo tanggal 2009

/ VA('A BANJARBARU,

RUDY RESNA WAN **k**

Diwulangkan di Sonja:
gado tanggal **4 N- i r,** 2009

SEKRETARIS D EI KC) BANJARBARI



BtJDI YAMIN

BF:RITA D ERAII KOTA BANJARBARU VUTUN 2009
NOMOR •17 SERI It' NOMOR SERI t3

APMLAH SUARA SAM PARTAI POLITIK
YANG MEMPEROLEH KHASI DI DPKD ICOTA BANJARBARII
HASIL PEMIUHAN MUM TABUN 2004

NO	NAMA PARPOL	135131	BIB 2	BIB 3	JUMLAH S1JARA	JUMLAH KURSI
1	1	3	1	5	6	7
1.	PPP	2.133	1.487	2.210	5.830	Y P V N N 1. N ue
2.	DEMOKRAT	1.621	-	2.040	3.861	
3.	PAN	2.230	-	1.518	3.748	
4.	MS	3.608	-	1.760.	5368	
5.	PER	1.170	-	2.921	4.091	
6.	PDIP	3.343	1.238	4.162	8.743	
7.	GOLKAR	8.175	1.665	5.126	14.966	
8.	P1(13	1.634	1.101	1340	4.075	
9	OF.RINDRA	-	-	-		
JUMLAH		24.114	5.491	21,077	50,682	24

WAL1K A BANJARBT,
1

RUDY RESNAWAN k

htmpirm, Pengutan Willikola Banjarbaru
Nano(1 altun 2009
Ton of 2009

**RESARNYA BANTVAN KEUANGAN KKPADA PARTA.1 rou'nK DI KOTA RANJARBARII
BASIL PEMILINAN U%WM PERIODS 2004.2009
TARUN ANGGARAN 2009**

No.	PARTAI POLITI(BESAR,NYA BANTUAN PER KURSI	JUMLAB KURSI	M/MLAII BANTI IAN
1	2	3	4	5
1.	POKRA	$1^9/12) \times 20.000.000$	6	Rp. 90.000.000.-
2.	PIMP	$(9/12) \times 20.000.000$	4	RP. 60.030.000 =
3.	PPP	$(9/12) \times 20.000.000$	3	RP. 45030,000.-
4.	PKS	$(9/12) \times 20.000.000$	3	RP.45.000.000.-
5.	P1(13	$(9/12) \times 20.000.000$	3	Rp. 45.000.000..
6.	PBR	$(9/12) \times 20.000.000$	2	Rp. 30.000000:
7.	PAN	$(5012) \times 20.000.000$	1	Rp. 30.000.000.-
S.	P. DEMOKRAT	$(9/12) \times 20.000.000$	2	Rp. 30000000.-
RAMAN			25	Rp. 375.000.000.-

WALIKO BANJARBARI.

-1

P^r RUDY RESNAWAN^T

Imupiran III Penitursn WaRota Bankablflo
Nom0/ Tatum 2009
Tengaal : 2000

**BENTDK BERITA ACARA
PENEUIIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PENGARJAN BANMAN KEVA\$GAN RUA' /A PARTAI POLITIK**

Pada bantany! bola Wain Tim Veralkaw Kelcoglamln Admmflanni
Raman latuangan kcpada Penni !Jolla Kam Danlitharu yang dibemuk tad:meta Kcpunnan Wolikou lianatianb
NOTlf uhnn ttlah measkunnam rem/ipso don pemeniaaan pcsymman adminiump Ivamaan
1.tv.n ol.cf4.1.. Partai Petra yang 44141:kaii 0102 .

Brolaaarlan ham' penttflan dan nfmatikaan periyaraun zflm ifffistrasi 17nmuan ifluaniszn kcpala 1'21131 Paha.
Tim manymalam ballfla Pans' Polo* ... Waft avian-AI repmatan annA rntodatuaaa dan 'gram/flab
Dumb ?isng tveilnaarkan ado perolchnn kuni pub pcmilthan Inman 'shun 2ffla yetsonyak Rp

Dam loan Orru Acam Hasa PetiC141411 claa Penfrikaan tn. Mtnua untuk Japes .1iperypenana uhummana
mcolnva.

Kir411fi411.4

**TIM YERIFOCASI KEItNOKAPAN ADMINISTRASI PENGAJ OAS PERMOIIONAN BATITVAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMIUKI KtJMSI DI DPRD KOTA SAW ARBARL**

Kth4.

.....

4.....

.....

Y.ALI A BANJAR:Art:,

, **RUDY RESSAWAN**

BERITA ACARA
SERAH TERDAA BANTUAN KEVANOAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pads iai a tempi— balsa tali=.....yam tataabitangan di bowel UP

1 Kopeks Balm KrAllat 1111(4,11 an Potlauhaaato Matarakat Ka" Bankukaa aka "Ma WORM. Maio/tam stanjunaa dlithot Plink Portant'.

2 Kea dun Fkmiaraa DK Postai Pima no atruun Iointao. wanpana dosola Vaal Kean

Canaan int monaaakan ',Akan Mak Porarra alah statataNan bantam avuon'ar lanai Polak Taws Anuaran 2009 k nada atau sauna lararg. alumina kp... dart Paak Koduo tcha merman& bantam kat/moan unebut Anti Km Dank molalui kekranto Kank DK Para PWb A

Baits Action Sttah tenni ml daanukan rah 'Moab Copy SP Al Caro honk can Ka Ilama POTLIMal Kota Ramadan. dilemma old) (OT: Portal Pobtak multi acbutan allaya yang berangkaan

Kaka. Pink Pavia
DPC.A n WA LIKOTA DAWARIIAitt;
KEPAtA DADAN KESRANG DAN LINMAS KOTA
Kaua. DANJARBARU.

Dn. H. DADANK YUDHASEPIA
Pembina think Muria
NIP. 1954027.1471034-003

Balflon,

/ WALIKO ANJARBARU.

RUDY RFSNAWAN

12uucuran V 1/Noluran Ndikaa litaujaahuru
Nornor tahun 2004
I anuaal 1009

Mop Sant Partin IYdniki

II INTIHK LAPORAN PIT4GOUNAAN RANTIJAN KLUANOAN
KEPADA PARTAI POLITIK TAIWN A.NGGARAN:009

Nam, Paul rain0
NPwa
Noma Mantua flan&
Alamo!
hernial, Kani
Iarnlah DaM

Ecanuan • Adminturau dan'auuSalavenun
i'tinSIMLIHIII AWN : tat du...

Rapala
1111. 14•111oun Llanjustioni
UI RANJARBARII

Banana tau ikan IguKan pmyytnaan dana bann n Lev an rung Puha kubscal berikut

NO.	11'SIS PENCI.I.UAKAN	JUMI.A)I liANG (tap)	KLITRANGAN
I)	4
1.	thannunun		
2.	harm Lambur		
3.	Adaninhaim limten		
4.	fawn= Dna Ws lase		
5.	Po, dun 61rn		
6.	PaineNisraan Otebang		
7.	Postlllwaan Dula dot Anti		
a.	Bays Pet)thean		
9.	Koipnuler		
10	Musin TO		
11	Manbellt Kimura		
	.11.1SILAH		

Itancluhan.

IIII Saud* Rahn Panailm Kean:van

.....

•WALIK A RANJARRAR/

RUDY RESNAWAN